

## **LITERASI PAJAK PADA SISWA SMA 1 GENTENG**

Muttafaqur Rohmah  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

### **Abstrak**

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Andaikan penerimaan pajak kurang maksimal, maka dampaknya akan membebani APBN. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan perumusan masalah deskriptif, hal ini dilakukan dengan alasan supaya mendapatkan data yang holistik dalam mengetahui potensi penelitian. Menumbuhkan kesadaran pajak bagi masyarakat merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Banyak faktor pendukung yang memengaruhi terwujudnya masyarakat sadar pajak. Bukan hanya kesadaran yang muncul dari masyarakat itu sendiri, namun institusi pajak juga dituntut semakin baik dan menjadi institusi yang bersih dan terpercaya. Kegiatan pengenalan pajak kepada generasi muda melalui kegiatan Pajak Bertutur akan membangun kesadaran pajak mereka. Apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka hal tersebut akan berbanding lurus dengan rasio kepatuhan wajib pajak. SMAN 1 Genteng ialah sekolah ter-favorite yang ada di kabupaten Banyuwangi. Direktorat Jenderal Pajak sangat berharap bahwa generasi muda Indonesia bisa menjadi awal yang baik untuk memulai Generasi Sadar Pajak karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa ini di masa depan.

*Kata Kunci : Literasi Pajak, Siswa & SMA 1 Genteng*

## I. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan penerimaan terbesar negara Indonesia. Merujuk pada data Kementerian Keuangan, tidak kurang dari 80 persen postur pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari sektor pajak (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

Pada tahun 2018, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun, Rp 1.618,1 triliun berasal dari penerimaan pajak dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Besarnya porsi penerimaan pajak menandakan bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Sudah selayaknya setiap warga negara mengetahui dengan baik setiap aspek perpajakan serta didukung dengan kepatuhan dalam

memenuhkan kewajiban perpajakan (Agustiningsih & Isroah, 2016).

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Andaikan penerimaan pajak kurang maksimal, maka dampaknya akan membebani APBN. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak yang sangat mendominasi dalam penerimaan negara, yaitu sekitar 80 persen penerimaan negara yang berasal dari pajak. Dapat kita bayangkan apabila penerimaan pajak tidak maksimal, hal ini akan mengganggu pos pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah (Cindy & Yenni, 2013). Pos tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan, subsidi ke masyarakat, maupun beberapa pengeluaran lain yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dan hal tersebut berkemungkinan akan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, yang akan berimbas pada menurunnya

kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat menurun, daya saing bangsa juga akan menurun. Karena itulah mulai sekarang, perlu adanya pendekatan secara komprehensif dan bersifat menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran pajak, khususnya menanamkan kesadaran pajak pada usia dini, usia yang masih bisa secara maksimal ditanamkan nilai-nilai kesadaran pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Ketika penerimaan pajak secara berkesinambungan selalu terjaga dan bahkan dapat meningkat secara signifikan, hal ini membuat pembangunan menjadi berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. Melihat kondisi kesadaran pajak masyarakat Indonesia saat ini, bisa dikatakan bahwa kondisi kesadaran pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Pada tahun 2017, rasio pajak atau tax ratio Indonesia hanya sebesar 10,8 persen (berdasarkan data hasil audit BPK tahun 2017). Di wilayah Asia Tenggara, rasio perpajakan Indonesia masih di bawah negara Kamboja, Singapura,

Malaysia dan Filipina. Sedangkan di kancah dunia, rasio pajak Indonesia sebesar 10,8 persen ini masih jauh di bawah standar rasio pajak ideal menurut Bank Dunia (World Bank) yaitu sekitar 15 persen (pajak.go.id). Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini adalah masih rendahnya kesadaran perpajakan para Wajib Pajak secara khusus, maupun masyarakat Indonesia secara umum. Data menunjukkan bahwa baru 11% masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, baru 5% masyarakat Indonesia yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta baru 0,1% masyarakat Indonesia yang sudah membayar pajak. Untuk itu, diperlukan pola yang sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan (Rahayu, 2017).

Kesadaran perpajakan perlu ditanamkan dalam pendidikan melalui inklusi dalam materi pembelajaran maupun kegiatan mahasiswa Pada tahun 2018,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan program inklusi kesadaran pajak pada pendidikan nasional (Suyanto & Pratama, 2018). Dimana program tersebut bertujuan untuk mengedukasi generasi penerus bangsa mengenai nilai-nilai kesadaran pajak dan mewujudkan generasi sadar pajak. Program inklusi kesadaran pajak ini diisi dengan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan literasi kesadaran pajak pada pendidikan dasar. Apabila penanaman nilai kesadaran pajak berhasil pada usia dini, diharapkan para remaja pada saat dewasa misalkan saat bekerja maupun mempunyai usaha, mereka sudah memiliki kesadaran akan kewajiban pajak dan mengerti pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan negara. Karena masih rendahnya tingkat pengetahuan mahasiswa tentang pajak ini, maka akan berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pajak, kecuali pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor yang memang diwajibkan dan diketahui secara

meluas di masyarakat (Subarkah & Dewi, 2017).

Memperkenalkan pajak pada generasi muda sejak dini penting. Hal ini dikarenakan pada usia dini, seorang siswa masih relatif mudah ditanamkan berbagai karakter dan penanaman sikap dasar. Menurut Mansur (2005:88) anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini merupakan masa emas atau golden age, karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Menurut berbagai penelitian di bidang neurologi terbukti bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Setelah anak berusia 8 tahun perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun mencapai 100% (Suyanto, 2005).

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pengenalan pajak pada generasi muda sejak dini diduga dapat membantu meningkatkan literasi dan persepsi yang baik terhadap perpajakan, sehingga menimbulkan niat dalam mengikuti pendidikan inklusi perpajakan. Oleh karena itu, peneliti menguji pengaruh tingkat literasi perpajakan dan persepsi perpajakan terhadap niat mengikuti pendidikan inklusi perpajakan. Menurut Novita (2010), Niat berkaitan erat dengan motivasi yang ada dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan suatu tujuan tertentu. Lalu menurut Devianty (2019), menyatakan bahwa penguasaan terhadap literasi sangat ditentukan oleh pendidikan. Pengenalan literasi perpajakan ke generasi muda dapat berupa penjelasan apa itu pajak, jumlah pajak yang dibayar, pemanfaatan pajak, penyampaian SPT melalui drop box, peraturan perpajakan yang up to date, dan fasilitas perpajakan yang modern. Barang publik,

infrastruktur, dan fasilitas pendidikan didanai oleh pajak serta merupakan elemen-elemen yang paling akrab ditemui di kehidupan sehari-hari generasi muda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguatan pemahaman pada sektor-sektor ini berpeluang besar dalam menanamkan moral dan etika pajak serta minat dalam belajar pajak.

## **II. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan perumusan masalah deskriptif, hal ini dilakukan dengan alasan supaya mendapatkan data yang holistik dalam mengetahui potensi penelitian. Sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data utama berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditetapkan menggunakan purposive sampling, observasi langsung yang dilakukan peneliti ketika penelitian dan sumber data tambahan berupa laporan-laporan serta dokumen yang ada. Teknik triangulasi dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan, dan peneliti

menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman dalam menganalisis data yang sudah ada (Sugiyono, 2016).

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Kesadaran Pajak dan Kaum Pemuda**

Menumbuhkan kesadaran pajak bagi masyarakat merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Banyak faktor pendukung yang memengaruhi terwujudnya masyarakat sadar pajak. Bukan hanya kesadaran yang muncul dari masyarakat itu sendiri, namun institusi pajak juga dituntut semakin baik dan menjadi institusi yang bersih dan terpercaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan dalam memberikan layanan serta kesederhanaan proses bisnis dalam institusi memang sangat memengaruhi semangat masyarakat untuk taat pajak. Selain itu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat juga menjadi salah satu hal penting. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi akan menghapus sikap skeptis masyarakat

terhadap institusi perpajakan. Namun tidak berhenti sampai di sana, melakukan pendekatan langsung pada masyarakat juga menjadi kunci untuk membangun hubungan yang semakin erat dan hangat. Sehingga mereka akan melihat bahwa institusi pajak tumbuh bersama mereka untuk membangun masyarakat (Cindy & Yenni, 2013).

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran pajak masyarakat, misalnya dengan adanya sosialisasi perpajakan, mata pelajaran maupun mata kuliah mengenai perpajakan pada kurikulum pembelajaran, dan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh institusi perpajakan itu sendiri. Idealnya, untuk membangun kesadaran pajak kepada masyarakat hendaknya mulai dilakukan sedini mungkin dengan menyasar generasi muda. Pada masa inilah penanaman nilai dan karakter menjadi efektif, salah satunya karakter mengenai kesadaran taat pajak (Budhiartama & Jati, 2016).

Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten mengadakan kegiatan Pajak Bertutur yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan Pajak Bertutur merupakan kegiatan mengajar tentang kesadaran pajak pada semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA/K. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menggaungkan program Inklusi Sadar Pajak serta untuk membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Tidak sendiri, DJP juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Gerakan Literasi Nasional (Tuwo, 2016).

Pajak Bertutur merupakan kegiatan yang efektif dalam mengenalkan pajak kepada masyarakat khususnya generasi muda. Mereka sudah mulai diberikan pengetahuan mengenai pajak, dimulai dari apa itu pajak, manfaat pajak bagi negara dan masyarakat,

siapa yang berkewajiban membayar pajak, dan mengenal institusi pengelola keuangan negara. Pengetahuan tersebut perlu diketahui dan dipahami oleh mereka, karena merekalah yang akan menjadi generasi masa depan Indonesia. Merekalah yang menentukan keberlangsungan negara Indonesia di masa mendatang. Sehingga mereka harus siap dengan tanggung jawab yang akan diemban nantinya, salah satunya adalah menjadi warga negara Indonesia yang baik dan taat pajak (Astana & Merkusiwati, 2017).

Kegiatan pengenalan pajak kepada generasi muda melalui kegiatan Pajak Bertutur akan membangun kesadaran pajak mereka. Dengan bekal ilmu yang mereka dapat dari kegiatan ini, mereka akan mempunyai pandangan dan pemahaman bahwa pajak merupakan suatu hal yang strategis dan vital demi keberlangsungan hidup sebuah negara. Sehingga sebagai masyarakat yang taat, sudah seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Dengan penanaman konsep ini, mereka akan sadar kedudukannya sebagai warga negara serta kontribusi apa yang dapat mereka berikan bagi negara kelak. Dan diharapkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat membangun kesadaran apa pun, tidak hanya kesadaran pajak, sehingga hal tersebut akan menjadi budaya yang baik bagi mereka (Suriambawa & Ery Setiawan, 2018).

Bukan hal yang mustahil bahwa usaha yang DJP lakukan hari ini akan membuahkan hasil dan memberikan dampak besar untuk tahun-tahun kemudian. Niscaya di waktu mendatang, kita akan melihat wajib pajak yang dengan penuh kesadaran dan kerelaannya membayar pajak dan melaporkannya dengan benar. Dan harapannya, kita tidak akan lagi melihat wajib pajak yang sengaja mengecilkan laba usaha dan menaikkan beban usahanya demi menciutkan pajak terutang. Kita tidak akan melihat wajib pajak yang takut untuk datang ke kantor

pajak, bahkan takut ketika mendengar kata pajak (Saputra, 2015).

Apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka hal tersebut akan berbanding lurus dengan rasio kepatuhan wajib pajak. Dan apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, maka tingkat penerimaan negara melalui sektor pajak pun juga semakin tinggi. Faktor penentu tingkat penerimaan pajak bukanlah sebuah faktor tunggal, melainkan banyak hal yang memengaruhi. Bukan hanya sekadar canggihnya analisis dalam penggalian potensi oleh fungsional pemeriksa pajak ataupun ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative (AR), namun yang tidak kalah penting adalah pendekatan psikologis kepada wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran pajak. Memang proses ini tidak berdampak secara instan, namun akan berdampak besar di kemudian hari demi meningkatkan penerimaan pajak. Selain fokus pada angka penerimaan, pendekatan psikologis ini juga akan membentuk

suatu budaya baik di masyarakat. Mengingat tujuan yang baik dari kegiatan Pajak Bertutur ini, maka kegiatan ini harus terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Kualitas penyelenggaraannya pun harus terus dapat ditingkatkan. Pajak Bertutur akan menjadi gaung kesadaran pajak di masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Dengan penyelenggaraan yang konsisten, maka Pajak Bertutur akan membawa DJP semakin dekat dan erat dengan masyarakat. Sikap terbuka inilah yang harus selalu dipupuk dan dijaga demi Indonesia yang maju dan sejahtera (Trisnawati & Sudirman, 2015).

#### **B. Literasi pajak untuk siswa SMAN 1 GENTENG**

SMA Negeri 1 Genteng adalah SMA negeri yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim no. 20, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Sama pada SMA yang ada di Indonesia, pendidikan sekolah ditempuh selama 3 tahun X,XI,XII terkecuali untuk kelas SCI(Siswa Cerdas Istimewa) yang hanya ditempuh selama 2 tahun. SMAN 1 Genteng ialah sekolah

ter-favorite yang ada di kabupaten Banyuwangi. Memiliki prestasi-prestasi yang membanggakan dari tahun ke tahun dalam bidang akademik maupun non akademik. Saat ini, SMA Negeri 1 Genteng berstatus Sekolah Standar Nasional. SMAN 1 Genteng pada tahun 2014 sudah menggunakan sistem SKS sangat relevan sekali ketika literasi pajak diberikan kepada sekolah ini (Dewi, Muttaqin, & Muftiyah, 2019). Indonesia adalah negara kaya, baik itu kekayaan alam, budaya maupun penduduknya yang lebih dari 260 juta. Apalagi pada tahun 2020-2030 Indonesia mengalami bonus demografi dimana usia produktif akan mendominasi populasi (Haseman, 2019).

Pada tahun-tahun tersebut adalah puncak kejayaan bagi Indonesia. SDM usia produktif yang akan berkreasi untuk bangsa Indonesia. Dengan bonus demografi seperti itu, tentunya akan banyak manusia yang bekerja dan banyak pula pendapatan perpajakan yang masuk ke kas negara. Namun, jika Pemerintah tidak bersiap untuk

menghadapi keadaan tersebut, bisa jadi itu menjadi boomerang bagi Indonesia. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah membludaknya pengangguran di Indonesia. Untuk itu pemerintah, perlu mempersiapkan diri untuk menangkap peluang dari adanya bonus demografi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap Warga Negara Indonesia wajib berpendidikan. Seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian, dipertegas dengan Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Habe & AHIRUDDIN, 2017).”

Hal ini jelas membuktikan bahwa negara sangat memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia. Apalagi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla wajib pendidikan

yang dulu wajib 9 tahun menjadi 12 tahun, atau setingkat SMA/SMK sederajat. Pendidikan saat ini memang sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi dimana setiap manusia dituntut untuk bisa dalam hal teknologi. Begitupun dengan sistem birokrasi yang mau tak mau harus berkembang seiring majunya perkembangan teknologi. Sekarang ini apa-apa berbasis komputer, dan masyarakat juga dituntut untuk menguasai teknologi (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010). Jalankan gaptek, pasif saja sudah ketinggalan zaman. Seperti kata Sri Mulyani pada seminar utama Hari Oeang 72 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta pada 26 Oktober 2017 yang lalu. Ibu menkeu mengungkapkan bahwa kaum millennial (sebutan untuk manusia zaman sekarang) itu harus 3C, yaitu creative, confidence, dan connected. Sekarang semua hal internet, maka mau tak mau anak zaman sekarang itu harus selalu terkoneksi dengan internet. Begitulah kira-kira pemaparan ibu Sri Mulyani pada seminar Hari Oeang

72. Selepas pendidikan dari SMA sederajat, nyatanya tak semua orang mampu untuk meneruskan kuliah. Kebanyakan dari mereka adalah rakyat menengah ke bawah, yang memang tak mampu untuk kuliah.

### **1. Memutuskan Bekerja**

Meski banyak beasiswa kuliah, namun pada kenyataannya banyak yang selepas SMA memutuskan bekerja dengan berbagai alasan. Ada yang memang sudah malas untuk belajar, beberapa sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dengan ijazah SMA/SMK sederajat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Februari 2017 menunjukkan dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 124,54 juta orang yang bekerja. Sisanya yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran. Padahal SMK sudah diorientasikan ketika lulus nanti langsung bekerja, tapi nyatanya tak semua terserap dalam dunia kerja. Dengan pendidikan setingkat SMA/SMK sederajat untuk memperoleh

pekerjaan pun bukanlah hal yang mudah. Mengingat banyak sekali pendidikan sarjana yang lulus tidak langsung bekerja alias menganggur. Untuk itu perlu diadakannya reformasi pendidikan, akan lebih baik jika ada mata pelajaran perpajakan di tingkat SMA sederajat. Setidak-tidaknya ketika tingkat tiga. Dimana para siswa dan siswi yang akan lulus dan menentukan pilihannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memilih bekerja. Mengapa demikian? Tentunya untuk bekal ketika mereka terjun di dunia kerja nantinya, sudah tidak kaget lagi dengan sistem perpajakan di Indonesia, juga menumbuhkan kesadaran sejak dini untuk membayar pajak (Rahman, 2018).

Seperti yang penulis paparkan sebelumnya bahwa tak semua lulusan SMA sederajat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, banyak dari mereka langsung bekerja. Dalam dunia kerja, tentu mereka mendapatkan penghasilan dari hasil kerjanya dan ada kewajiban pajak

jika melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp54 juta per tahun untuk orang pribadi. Kemudian kemungkinan melakukan usaha UMKM yang dikenai pajak final 1% x bruto, tentunya akan kesulitan dalam urusan administrasi pajak karena belum mengerti perpajakan dan sistem perpajakan. Untuk itu sangat perlu ada mata pelajaran perpajakan di tingkat SMA sederajat. Dengan adanya mata pelajaran perpajakan di SMA, bagi siswa yang langsung bekerja, dan memenuhi persyaratan untuk kewajiban perpajakan tidak akan dipusingkan lagi dengan tata cara perpajakan (Putri, 2016).

Mulai dari mendaftar NPWP sampai dengan pelaporan SPT. Selain itu, dengan adanya mata pelajaran perpajakan di tingkat SMA, akan menumbuhkan kesadaran bagi siswa untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran membayar pajak sudah ditanamkan sejak dini dalam mata pelajaran perpajakan tersebut. Hal ini merupakan salah satu cara untuk edukasi perpajakan sejak dini. Selain itu, program ini juga menjadi inklusi

keuangan bagi calon-calon penerus bangsa yang akan menjadi bagian dari angkatan kerja dalam bonus demografi pada tahun 2020-2030.

Bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Pemuda adalah potensi yang sangat besar dan masih mudah untuk dibentuk agar dimasa depan mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak ada adanya dana. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memagang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain (Cyrino, Parente, Dunlap, & de Góes, 2017).

Dewasa ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga

tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari stereotype pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga misalnya, orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa kemudahan akses yang dimiliki keluarga, ketercukupan Sumber Daya Alam, dan juga banyaknya penyedia kebutuhan sehari-hari adalah hasil dari ayah yang membayar pajak setiap bulannya. Dari lingkungan keluarga inilah anak akan memahami bahwa sebenarnya uang yang kita bayarkan setiap bulannya adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Pada saat anak berada di lingkungan sekolah, guru bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa karena pajaklah mereka bisa menikmati fasilitas sekolah karena bangunan sekolah, fasilitas yang ada di sekolah,

dana operasional sekolah dan juga gaji dari guru-guru mereka berasal dari uang pajak yang dibayarkan warga negara yang taat membayar pajak (Ihori & Ihori, 1996).

Kemudian dari lingkungan masyarakat, anak-anak bisa belajar bahwa fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang akan berguna untuk masyarakat luas karena bisa menjadi jembatan untuk tercapainya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Uang pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan disalurkan keseluruh instansi dan akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan juga untuk membiayai operasional kantor-kantor pelayanan publik dan untuk membayar gaji ASN yang sudah bekerja untuk negara ini.

Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan

pengetahuan yang mendasar tentang pajak kepada anak usia dini, contohnya Pajak Bertutur dan juga Tax Goes to School atau Tax Goes to Campus. Pajak Bertutur sendiri adalah program Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran pajak di sektor pembangunan dengan menargetkan 2.000 lembaga Pendidikan baik SD, SMP, SMA, dan Universitas di seluruh Indonesia. Sementara Tax Goes to School adalah Program Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pajak kepada anak-anak usia dini karena merekalah generasi muda bangsa ini dan mereka harus mengenal pajak dengan baik, karena merekalah kelak yang akan menjadi konsumen akbar dan lading potensi perpajakan.

Tax Goes to School tidak efektif jika anak-anak diberi pengetahuan pajak yang langsung

berat dan bersifat formal, jadi Tax Goes to School harus bersifat fun tapi tetap mengedukasi, Tax Goes to School berfokus pada penjelasan manfaat pajak yang bisa dirasakan mereka sejak dini. Sementara Tax Goes to Campus adalah program Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi pengetahuan pajak kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas di Indonesia. Tax Goes to Campus menyasar mahasiswa dan mahasiswi karena mereka sebentar lagi akan terjun ke dunia kerja dan dunia usaha, jadi diperlukan pembekalan yang cukup supaya mereka bisa ikut berkontribusi kepada negara melalui pajak.

Melalui Tax Goes to School, Direktorat Jenderal Pajak bisa meminimalisir Free Rider yang hanya ikut menikmati fasilitas publik tapi tidak berkontribusi kepada negara. Acara ini dilakukan agar mahasiswa dan mahasiswi tidak buta pengetahuan pajak saat terjun ke dunia kerja karena banyak instansi dan perusahaan yang akan memberikan syarat kepemilikan NPWP kepada calon karyawannya.

Tidak hanya itu, jika mahasiswa berupaya untuk membuka usaha sendiri maka mereka juga memerlukan NPWP untuk menjalankan usaha mereka dan bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang perlu ditekankan adalah apabila mereka telah memiliki NPWP maka mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta dan SPT Tahunan mereka. Saat mereka memiliki NPWP mereka harus mengerti hak dan kewajibannya, apabila mereka telah mengerti hak dan kewajibannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan membantu urusan mereka juga.

#### **IV. KESIMPULAN**

Direktorat Jenderal Pajak sangat berharap bahwa generasi muda Indonesia bisa menjadi awal yang baik untuk memulai Generasi Sadar Pajak karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa ini di masa depan. Direktorat Jenderal Pajak juga meminta dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam mengedukasi para generasi muda bangsa Indonesia. Inklusi Kesadaran Pajak bertujuan untuk mewujudkan

nilai-nilai kesadaran pajak sebagai salah satu nilai budaya bangsa, mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional, memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan pendidikan dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia, menyediakan literasi kesadaran pajak bagi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan, dan meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta bagi masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi maupun pengenalan tentang perpajakan harus terus berjalan agar tingkat kepatuhan wajib pajak senantiasa naik. Upaya untuk mengenalkan pajak sedari dini juga harus dilakukan untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang kian sadar pajak. Karena generasi masa depan merupakan tonggak keberlangsungan negara Indonesia ini. Melalui Inklusi Kesadaran Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menginginkan generasi mendatang memiliki budaya dan karakter berwawasan kebangsaan

seperti cinta tanah air, bela negara, dan termasuk kesadaran membayar pajak. Untuk itu, pendidikan yang mengandung unsur nilai-nilai kesadaran pajak digalakkan agar generasi mendatang dapat membentuk bangsa yang berbudaya dan berperadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.21831/Nominal.V5i2.11729>
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). Paradigma Pendidikan Nasional Abad Xxi. *Paradigma Pendidikan Nasional Abad Xxi*.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*.
- Cyrino, A. B., Parente, R., Dunlap, D., & De Góes, B. B. (2017). A Critical Assessment Of Brazilian Manufacturing Competitiveness In Foreign Markets. *Competitiveness Review*. <https://doi.org/10.1108/Cr-08-2016-0046>
- Dewi, N. L., Muttaqin, A. I., & Muftiyah, A. (2019). Implementasi Strategi Information Search Dengan Memaksimalkan Penggunaan Smartphone Dalam Pembelajaran Pai Kelas X Mipa 1 Di Sma Negeri 1 Genteng Tahun Pelajaran 2018/2019. *Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.29062/Tarbiyatuna.V3i2.266>
- Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24967/Ekombis.V2i1.48>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*.
- Haseman, J. B. (2019). Indonesia. In

- Asian Security Handbook: Assessment Of Political-Security Issues In The Asia-Pacific Region.* <https://doi.org/10.4324/9781315285092-15>
- Ihori, T., & Ihori, T. (1996). Intergenerational Transfers. In *Public Finance In An Overlapping Generations Economy.* [https://doi.org/10.1057/9780230389908\\_11](https://doi.org/10.1057/9780230389908_11)
- Putri, L. R. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016.*
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.*
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi.*
- Saputra, R. (2015). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman).*
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak.* <https://doi.org/10.29040/Jap.V17i02.210>
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta.*
- Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wpop. *E-Jurnal Akuntansi.* <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I03.P21>
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan Dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.* <https://doi.org/10.24914/Jeb.V21i1.704>
- Trisnawati, M., & Sudirman, W.

(2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel , Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.